

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh inflasi, pencairan tunggakan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2019-2022. Penelitian ini dilakukan menggunakan data bulanan, dengan sampel sebanyak 48 data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, hasil uji nilai F lebih kecil dari *alpha* atau $0,004 < 0,05$ hal ini menunjukkan model regresi sangat layak digunakan. Kemudian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 17,5% variasi variabel dependen penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel independen inflasi, pencairan tunggakan pajak, dan pemeriksaan pajak, sedangkan sebesar 82,5% dijelaskan oleh faktor diluar model regresi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa:

1. Variabel independen inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29.
2. Variabel independen pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29.
3. Variabel independen pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketersediaan data yang disediakan oleh KPP Pratama Yogyakarta hanya tersedia maksimal 4 tahun dari tahun berjalan. Peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya, ada baiknya sebelum mengajukan judul riset dari *e-riset* peneliti melakukan konsultasi mengenai ketersediaan data dan ketersediaan jumlah data tersedia sehingga data yang digunakan bebas dari kemungkinan bias.

5.3. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, implikasi yang dapat peneliti berikan adalah

1. Bagi pemerintah terutama kementerian keuangan, diharapkan dengan penelitian ini pemerintah dapat memaksimalkan atau mengencangkan secara menyeluruh pemeriksaan pajak dengan produk berupa SKP untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak.
2. Bagi DJP, dengan hasil penelitian variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif dapat menjawab riset yang diperlukan yaitu optimalisasi fungsional pemeriksa pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Melalui hasil penelitian ini DJP dapat memfokuskan atau menaruh prioritas pemeriksaan pajak pada kebijakan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3).

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. (2001). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. (2012). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se 29/Pj/2012. Kebijakan Penagihan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Dwiatmanto, Pratama, N. P., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss Ibm 23. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Enam. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.
- Indonesia, B. (2021). Pengenalan Inflasi. Retrieved From Bi: [Http://Www.Bi.Go.Id/Id/Moneter/Inflasi/Pengenalan/Content/Default.aspx](http://www.bi.go.id/Id/Moneter/Inflasi/Pengenalan/Content/Default.aspx)
- Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.03/2007. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.03/2013. Tata Cara Pemeriksaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686. Jakarta

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Wajib Pajak. Lembaran Negara Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650. Jakarta

Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740. Jakarta

Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3567. Jakarta

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985. Jakarta

- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbari 2016. Bulaksumur: Andi: Yogyakarta.
- Monica, R., & Andi. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nanga, M. (2005). Makro Ekonomi Teori, Masalah, & Kebijakan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Natsir, M. (2014). Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia. (2000). Undang – Undang Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984. Jakarta
- Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat
- Setyani, M. D. (2019). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, N. G. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pencairan
Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Malang: Unikma



DAFTAR REFERENSI

- Inflasi Umum. (2023). Retrieved From BADAN PUSAT STATISTIK: Bps.Go.Id
- Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.03/2022 Tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29, Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019. Jakarta
- Keuangan, K. (2022). Tema Riset. Retrieved From DJP: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ozxdadics4iwehejlm9obtvsnzagg2g1jm5bvwkas-s/edit#gid=1475342674>